

Implementasi Program Satu Desa Dua Sarjana Dalam Membantu Mencegah Kesenjangan Pendidikan Di Kabupaten Blora

Muhamad Habib Hussein¹⁾, Ulul Albab²⁾, Zaenal Fatah³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: muhamadhabib0601@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul implementasi program satu desa dua sarjana dalam membantu mencegah kesenjangan pendidikan di kabupaten Blora. Salah satu program beasiswa yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Blora adalah Program “Satu Desa Dua Sarjana”. Tujuan program beasiswa satu desa dua sarjana itu untuk mewujudkan pemerataan ilmu pengetahuan dan keterampilan masing-masing orang atau warga yang memerlukan, serta mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena kurangnya biaya pendidikan. Beasiswa ini juga merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi bagi mahasiswa Blora untuk lebih berprestasi baik secara akademik maupun non akademik. Berdasarkan jenis penelitiannya, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Implementasi Program “Satu Desa Dua Sarjana” Dalam Membantu Mencegah Kesenjangan Pendidikan Di Kabupaten Blora. Pada penelitian ini, yang menjadi fokus kajian penelitian adalah tentang bagaimana implementasi program satu desa dua sarjana dalam membantu mencegah kesenjangan pendidikan di Kabupaten Blora. Kemudian focus penelitian yang kedua adalah faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi satu desa dua sarjana dalam membantu mencegah kesenjangan pendidikan di Kabupaten Blora. Program satu desa dua sarjana yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora untuk pemerataan pendidikan khususnya bagi warga miskin agar tetap bisa merasakan mengenyam pendidikan perguruan tinggi negeri. Program satu desa dua sarjana yang ada di kabupaten Blora saat ini berada di bawah kendali Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Hasil penelitian merujuk pada teori Edward pada aspek komunikasi antar implementor berjalan baik. Kemudian aspek struktur birokrasi masih belum berjalan maksimal. Pada aspek seperti karakter pelaksana program sudah menjalankan kebijakan sesuai aturan. Dan aspek sumber daya secara keseluruhan sudah dirasa cukup bagus dalam pelaksanaan programnya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Satu Desa Dua Sarjana, Kesenjangan Pendidikan

ABSTRACT

This research is entitled the implementation of the one village two undergraduate program in helping to prevent educational disparities in Blora district. One of the scholarship programs currently being pursued by the Blora Regency government is the “One Village Two Graduates” Program. The aim of the one-village two-graduate scholarship program is to achieve an even distribution of knowledge and skills for each person or citizen who needs it, and to reduce the number of students dropping out of college due to a lack of education costs. This scholarship is also a form of appreciation and appreciation for Blora students to achieve more both academically and non-academically. Based on

the type of research, the authors chose to use a qualitative research method which aims to provide an overview of the Implementation of the "One Village Two Bachelors" Program in Helping to Prevent Educational Gaps in Blora District. In this study, the focus of the research study was on how the implementation of the one village, two graduates program helped prevent educational disparities in Blora District. Then the second research focus is what factors influence the implementation of one village of two graduates in helping to prevent educational disparities in Blora Regency. The one village, two graduates program rolled out by the Blora Regency Government (Pemkab) for equal distribution of education, especially for the poor, so that they can still enjoy receiving a state university education. The one village two undergraduate program in Blora district is currently under the control of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P3A). The results of the study refer to Edward's theory that the communication aspect between implementers is going well. Then aspects of the bureaucratic structure are still not running optimally. In aspects such as the character of program implementers, they have implemented policies according to the rules. And the aspect of resources as a whole is considered quite good in implementing the program.

Keywords: Policy Implementation, One Village Two Scholars, Education Gap

A. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi kebanyakan setiap orang mempunyai harapan baru yang ingin dicapai. Di sinilah kesempatan terbuka lebar untuk mengembangkan kemampuan, minat, dan bakat dalam aspek apa pun, terutama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Suasana abad 21 ini akan menjadikan hidup semakin kompetitif, sehingga kreativitas dan profesionalisme akan mengantarkan seseorang untuk dapat memperoleh peluang hidup yang membahagiakan.

Fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda pada suatu bangsa agar memiliki kemampuan untuk menjawab segenap tantangan yang mereka hadapi pada zamannya. Kualitas sumber daya manusia telah menjadi tuntutan global masyarakat dunia yang ada pada era milenium ke-3 ini persaingan individu terasa semakin ketat dan kompetitif.

Secara umum, fungsi pendidikan nasional di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut disebutkan Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada masa pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbud) bekerja ekstra keras melalui sejumlah terobosan agar roda kegiatan Pendidikan terus begulir secara baik dan berkualitas. Apalagi ketika pandemi merebak Kemendikbud merespons dengan mengucurkan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, serta memberikan bantuan subsidi

upah kepada 1.634.832 PTK PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, 374,836 PTK Pendidikan Tinggi, dan 48.000 pelaku budaya dan seni. Selanjutnya, berdasarkan basis data portal Rumah Belajar, total pengguna baru Rumah Belajar pada tahun 2020 sebanyak 7,79 juta dengan pengunjung portal Rumah Belajar sebanyak 105,532 juta.

Terobosan lain yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah dan pihak lain yaitu KIP Kuliah yang merupakan beasiswa diberikan langsung oleh pemerintah bagi para siswa yang berpotensi akademik baik, namun memiliki keterbatasan dari segi ekonomi. Djarum Beasiswa Plus yaitu beasiswa perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Djarum Foundation Sejak tahun 1984. Beasiswa BCA Finance diselenggarakan untuk para mahasiswa PTN/PTS yang menempuh pendidikan S1. Serta yang terakhir yakni Beasiswa Bank Indonesia.

Berbicara mengenai kondisi pendidikan yang ada di Indonesia, salah satu wilayah di Indonesia yang perlu mendapat perhatian adalah di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Blora. Kabupaten Blora merupakan salah satu kawasan yang masyarakatnya masih berpendidikan rendah. Dibuktikan pada tahun 2013, penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan sampai SD sebesar 14.336 anak, SMP sebesar 10.864 siswa, sedangkan jenjang SMA hanya 7.766 orang dari 485.265 jiwa (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2015: 42).

Perekonomian merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi tingkat pendidikan di Blora karena rata-rata penduduk Blora bermata pencaharian sebagai petani yang penghasilannya tidak pasti dan tergantung dengan waktu panen, maka tak jarang masyarakat Blora memiliki pendidikan yang rendah.

Berdasarkan permasalahan yang pernah terjadi diatas, pemerintah Kabupaten Blora pernah mencanangkan bantuan sosial Program

Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2014 yang diadakan oleh pemerintah pusat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan, dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah: Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Kementerian Sosial RI, 2017: 3).

Mengenai hal tersebut kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Blora banyaknya tersedia fasilitas dan Sumber daya pendidikan, murid SMA/ sederajat pada tahun 2020 mencapai 9.315 yang 50% akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi Negeri/Swasta (PTN-PTS) di Jawa dan sudah menjalin MoU dengan Pemkab Blora menyatakan segera susun sejumlah program untuk bersama-sama menata kualitas pendidikan kembali di Kabupaten Blora. Hal itu disampaikan Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si. dan jajarannya pada saat rapat bersama antara perwakilan PTN dan PTS.

Salah satu program beasiswa yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Blora adalah Program “Satu Desa Dua Sarjana”. pada April 2022 terdapat sebanyak 77 anak telah dibantu pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora untuk bisa kuliah di berbagai perguruan tinggi. Mereka tersebar dari 60 desa di seluruh wilayah Blora. 48 Desa dengan satu penerima, 9 Desa terdapat dua penerima, satu desa terdapat tiga penerima, serta dua desa lain terdapat empat penerima. Mustakim, Kepala Bidang Sosial (Kabid Sosial) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora (Dinsos P3A) mengaku jumlah tersebut masih belum memenuhi kuota yang ditetapkan oleh Pemkab Blora. ”Tersedia dana untuk 30 mahasiswa. Tapi, baru terisi sembilan mahasiswa,”

Demi mewujudkan program Satu Desa Dua Sarjana, Pemkab Blora telah menyediakan kuota sebanyak 20 beasiswa bagi putra putri daerah Kabupaten Blora yang kurang mampu, untuk dididik di PEM Akamigas mulai Tahun Akademik 2021/2022 ini. Penerima manfaat program Satu Desa Dua Sarjana adalah mereka yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, yang akan mendaftar harus sudah diterima di kampusnya. Tidak berlaku bagi yang sudah menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar- Kuliah (KIP Kuliah).

Sebanyak 89 lulusan SMA/MA IPA atau SMK Teknik di wilayah Kabupaten Blora telah mengirimkan berkas pendaftaran mahasiswa baru PEM Akamigas Tahun Akademik 2021/2022. Namun hanya 39 orang yang lolos uji administrasi dan berhak untuk mengikuti uji tulis dan wawancara di PEM Akamigas.

Menurut peneliti agar program bantuan beasiswa tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran, tepat jumlahnya dan tepat waktu, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora memberikan petunjuk teknis pemberian beasiswa. Selain itu dengan pedoman diharapkan dapat memudahkan mahasiswa yang akan diusulkan sebagai calon penerima beasiswa dan memudahkan penerima beasiswa untuk menjalankan hak dan kewajibannya serta mengurangi stunting pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin mengambil judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM SATU DESA DUA SARJANA DALAM MEMBANTU MENCEGAH KESENJANGAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BLORA”**

B. LANDASAN TEORITIS

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tahapan dalam proses kebijakan publik, pada umumnya implementasi diterapkan setelah suatu kebijakan ditetapkan implementasi merupakan sebuah rangkaian aktifitas dalam rangka

menghantarkan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut membawa hasil seperti yang diharapkan. Implementasi kebijakan pada intinya adalah suatu cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dan latar belakang pembentukannya terdapat dua acara implementasi kebijakan yaitu secara langsung mengimplementasikannya dan melalui formulasi kebijakan.

a. Model Implementasi Kebijakan Publik Van Horn Van Metter

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumurkan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau permofmansi suatu pengejewan paham kebijakan yang pada dasarnya secara senaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik

b. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

What is the precondition for successful policy implementation?

What are the primary obstacles to successful policy implementation?

George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi.

1. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

2. Sumber Daya

Edwards III (1980) mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari: “*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*”. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; “*Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed*”.

“Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam

transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”. (Tachjan, 2006:135)

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005) mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

4. Komunikasi

Menurut Agustino (2006); “komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

2. Konsep Beasiswa

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang

digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh (<http://id.wikipedia.org/wiki/beasiswa>). Menurut Murniasih (2009) beasiswa diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu institusi atau penghargaan berupa bantuan keuangan. Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh/2000.

a. Jenis-Jenis Beasiswa

Menurut Murniasih (2009), ada beberapa jenis beasiswa yaitu:

1. Beasiswa Penghargaan

Beasiswa ini biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Meski sangat kompetitif, beasiswa ini ada dalam berbagai bentuk.

2. Beasiswa Bantuan

Jenis beasiswa ini adalah untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa yang kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi. Komite beasiswa biasanya memberikan beberapa penilaian pada kesulitan ini, misalnya, seperti pendapatan orangtua, jumlah saudara kandung yang sama-sama tengah menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan lain-lain.

3. Beasiswa Atletik

Universitas biasanya merekrut atlet populer untuk diberikan beasiswa dan dijadikan tim atletik perguruan tinggi mereka. Banyak atlet menyelesaikan pendidikan mereka secara gratis, tetapi membiayainya dengan prestasi olahraga. Beasiswa seperti ini biasanya tidak perlu

dikejar, karena akan diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi.

4. Beasiswa Penuh

Banyak orang menilai bahwa beasiswa diberikan kepada penerimanya untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan. Jika Anda benar-benar beruntung, tentunya Anda akan mendapatkan beasiswa seperti ini. Beasiswa akan diberikan untuk menutupi kebutuhan hidup, buku, dan biaya pendidikan.

b. Definisi Beasiswa Miskin

Beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD yang selanjutnya disebut dengan Beasiswa Miskin (BSM-SD) adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa sekolah dasar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penerima beasiswa adalah siswa SD baik negeri maupun swasta yang duduk dikelas I, II, III, IV, V, VI yang telah ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Siswa miskin/mampu adalah siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.

Lembaga penyalur adalah lembaga yang menyalurkan dana BSM-SD di daerah. (Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Miskin Sekolah Dasar BSM-SD, (Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat jendral Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2011). Upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan, serta menekan angka putus sekolah pemerintah memperluas akses pendidikan dasar yang lebih bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada penduduk miskin. Perhatian tersebut berupa pemberian beasiswa bantuan siswa miskin (BSM-SD).

Pemberian bantuan BSM-SD bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi penduduk miskin untuk dapat memenuhi biaya kebutuhannya di bidang pendidikan agar siswa yang orang tuanya tidak mampu atau `miskin tetap memperoleh pendidikan. Hal ini juga dalam rangka mendukung pencapaian program wajib belajar Sembilan tahun, yang di amanatkan oleh Kepmendikhub No. 036/N/95 1995, dan peraturan pemerintah RI Nomor: 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Lebih lanjut program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah. Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumahtangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa. Dana BSM diberikan

kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi (Google. com). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan beberapa kereteria siswa yang mendapatkan beasiswa muskin yaitu: tingkat kehadiran 75%, berasal dari keluarga tidak mampu, menjadi siswa pada tahun itu, berkepribadian yang baik dan taat pada peraturan sekolah.

3. Program Satu Desa Dua Sarjana

Program satu desa dua sarjana yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bloro untuk pemerataan pendidikan khususnya bagi warga miskin agar tetap bisa merasakan mengenyam pendidikan perguruan tinggi negeri. Selain itu program tersebut untuk peningkatan sumber daya manusia untuk berdaya saing yang berkualitas di era digitalisas.

Tujuan program beasiswa satu desa dua sarjana itu untuk mewujudkan pemerataan ilmu pengetahuan dan keterampilan masing-masing orang atau warga yang memerlukan, serta mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena kurangnya biaya pendidikan. Beasiswa ini juga merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi bagi mahasiswa Bloro untuk lebih berprestasi baik secara akademik maupun non akademik.

4. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Implementasi Program “Satu Desa Dua Sarjana” Dalam Membantu Mencegah Kesenjangan Pendidikan Di Kabupaten Blora.

Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim, 2002).

2. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi fokus kajian penelitian adalah tentang bagaimanakah bagaimana implementasi program satu desa dua sarjana dalam mencegah stunting pendidikan di Kabupaten Blora. Kemudian focus penelitian yang kedua adalah faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi satu desa dua sarjana dalam mencegah stunting pendidikan di Kabupaten Blora

Pada penelitian ini akan dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George. C. Edward yaitu terkait empat indikator pengukuran untuk melihat sejauh mana implementasi itu diterapkan. Empat indikator tersebut diantaranya yaitu Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Blora yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dengan stakeholder yang lain seperti pihak swasta dan masyarakat sebagai peserta yang akan

mengajukan beasiswa program Satu Desa Dua Sarjana agar program yang diterapkan bisa diimplementasikan dengan baik.

2. Sumberdaya

Sumber daya yang dimaksud adalah Bagaimana kualitas dan peran sumberdaya pendukung dalam pelaksanaan program Satu Desa Dua Sarjana Kabupaten Blora baik dari aspek Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Fasilitas, maupun Sumber Daya Anggaran.

3. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang dimaksud adalah bagaimana alur birokrasi yang berjalan di tengah pelaksanaan program Satu Desa Dua Sarjana, seperti apakah program ini ketika diimplementasikan kepada masyarakat.

4. Disposisi

Pada poin ini yang dimaksud adalah bagaimana sikap dan karakter pelaksana kebijakan baik dari pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat sebagai satu keterikatan dalam sebuah proses pelaksanaan kebijakan. Sikap yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi pelaksanaan kebijakan. Begitupun juga sikap yang kurang baik akan berdampak pada buruknya kinerja pelaksanaan program.

3. Lokasi Penelitian

Agar memperoleh data yang akurat atau mendekati kebenaran sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti memilih dan menetapkan lokasi penelitian di Kabupaten Blora, Tepatnya Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Blora. Sedangkan alasan dalam pemilihan lokasi di Kabupaten Blora dikarenakan Kabupaten Blora menjadi salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat pendidikan cukup rendah, selain itu dimaksudkan agar peneliti lebih memahami tentang bagaimana program Satu Desa Dua Sarjana ini dilaksanakan di Kabupaten Blora.

4. Informan Penelitian

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas/Kepala Bagian/Kepala Staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora	1
2	Staf/Pegawai Pelaksana Program Satu Desa Dua Sarjana Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora	1
3	Tim Survey Lapangan	2
4	Masyarakat Calon Penerima Bantuan Program Satu Desa Dua Sarjana	3

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan dasar dalam menganalisa apa saja permasalahan dengan menggunakan buku-buku dari beberapa ahli. Selain itu peneliti juga akan menjadikan referensi jurnal dan website sebagai salah satu komponen pendukung.
2. Studi Lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi yaitu meliputi proses wawancara, dokumentasi, dan observasi.
 - a. Wawancara. Pada tahap ini penulis akan memberikan beberapa pertanyaan yang dibutuhkan kepada narasumber seputar fokus penelitian program Satu Desa Dua Sarjana, tujuan penelitian sehingga hasil yang didapatkan bisa secara maksimal dan mampu memperoleh data yang dibutuhkan.
 - b. Observasi. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati keadaan lokasi yang dituju untuk mencari data yang terlihat dari kegiatan pelaksanaan program

Satu Desa Dua Sarjana di Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora.

- c. Dokumentasi. Pada bagian ini penulis akan mengumpulkan dokumen atau berkas yang didapat dari lokasi penelitian maupun dari narasumber sebagai bahan untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Dokumentasi biasa berupa gambar penelitian pelaksanaan kegiatan suatu program dan data pendukung. Hasil dari dokumentasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu data pendukung dalam keaslian bukti penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu analisa data yang dilakukan pada teknik pengolahan data seperti pengecekan data dan tabulasi. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

Menurut Miles & Huberman (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi

data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

D. HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Blora

Kabupaten Blora merupakan wilayah yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan yang memiliki ketinggian yaitu 20 meter-280 meter diatas permukaan laut. Bagian utara kabupaten Blora merupakan kawasan perbukitan kapur, yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian selatan juga berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng, yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan yang terletak di provinsi Jawa timur.

Ibukota kabupaten Blora sendiri terletak di cekungan Pegunungan Kapur Utara yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan perkantoran. Kantor yang dimaksudkan adalah kantor pemerintah daerah, kantor perbankan dan gedung sekolah (Blorakab.go.id, 2022). Separuh dari wilayah Kabupaten Blora yaitu merupakan kawasan hutan, terutama di bagian utara, timur, dan selatan. Dataran rendah di bagian tengah kawasan kabupaten ini umumnya merupakan areal persawahan, yang sebagian besar dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat penduduk setempat. Sawah di Kabupaten Blora sebagian besar merupakan areal sawah tadah hujan dimana masyarakat hanya menggantungkan intensitas hujan untuk menggarap sawah mereka.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Blora merupakan daerah krisis air baik yang digunakan untuk air minum maupun untuk irigasi persawahan pada musim kemarau, terutama di daerah pegunungan kapur

4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora sesuai Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berdasarkan pada Peraturan Bupati Blora Nomor 67 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam perumusan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mengacu pada Peraturan Presiden Sumber: Dokumentasi Penelitian stem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cata Reviu Atas Laporan



Gambar 4. Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023)

4.3 Implementasi Program Satu Desa Dua Sarjana

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu sektor yang masih mendapat perhatian paling besar karena masih ditemukan masalah mendasar dalam bidang pendidikan yakni ketiadaan biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan anak putus sekolah. Diketahui sampai saat ini tingkat partisipasi anak yang sekolah, baik pendidikan formal maupun informal masih rendah. Kabupaten Blora merupakan salah satu kawasan yang masyarakatnya masih berpendidikan rendah. Dibuktikan pada tahun 2018, penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan sampai SD sebesar 14.336 anak, SMP sebesar 10.864 siswa, sedangkan jenjang SMA hanya 7.766 orang dari 485.265 jiwa (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Perekonomian merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi tingkat pendidikan di Blora karena rata-rata penduduk Blora bermata pencaharian sebagai petani yang penghasilannya tidak pasti dan tergantung dengan waktu panen, maka tak jarang masyarakat Blora memiliki pendidikan yang rendah.

Program Satu Desa Dua Sarjana yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Blora untuk pemerataan pendidikan khususnya bagi warga miskin agar tetap bisa merasakan mengenyam pendidikan perguruan tinggi negeri. Selain itu program tersebut untuk peningkatan sumber daya manusia untuk berdaya saing yang berkualitas di era digitalisasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (l.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (l.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan "beasiswa" adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan "bantuan biaya pendidikan" adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Implementasi Program Satu Desa Dua Sarjana Di Kabupaten Blora

1. Dukungan Pemerintah Desa terhadap Program Satu Desa Dua Sarjana, dukungan yang diberikan pemerintah desa terhadap pendidikan tinggi cukup baik. Pemerintah desa yang merupakan pelaksana program memiliki kepedulian yang berorientasi pada pencapaian tujuan bersama terhadap isu peningkatan minat dalam pendidikan tinggi pemuda desanya. Tujuan dalam upaya membentuk sumber daya manusia melalui pemuda yang berkualitas ini sebagai proses memberdayakan masyarakat

desanya dan menyiapkan sumber daya manusia untuk pengembangan desanya.

2. Sumber Daya Manusia Dinas Sosial P3A Cukup Melimpah, Keuntungan yang didapatkan dari pelatihan kualitas pegawai dan lainnya memberikan dampak positif terhadap Dinas Sosial P3A dalam jumlah yang cukup besar setiap tahunnya, salah satunya adalah program Beasiswa Satu Desa Dua Sarjana yang ditunjang sejak dibuat pada tahun 2021 ini.

3. Sebagai Visi Pemerintah Daerah Meningkatkan Pendidikan, Program ini dibuat untuk pemeratakan pendidikan dan mencegah kesenjangan pendidikan yang tinggi di kabupaten Blora. Dengan adanya program Satu Desa Dua Sarjana maka dalam beberapa tahun kedepan hasilnya akan bisa dilihat.

Dinas Sosial P3A sangat optimis bahwa jika program ini dapat dilaksanakan bersama-sama maka hasilnya pun akan sangat baik dan maksimal. Maka dari itu perlu persamaan visi dan aksi yang harus dilakukan agar program satu desa dua sarjana ini bisa dimaksimalkan dengan baik.

4.5 Analisa Penelitian Menggunakan Teori George C. Edward III

1) Komunikasi

Implementasi program Beasiswa Satu Desa Dua Sarjana dalam hal komunikasi telah terjalin baik. Pola koordinasi antar organisasi yang terjalin antara pemerintah Kabupaten dengan unsur pendidikan tinggi terkait mekanisme pendaftaran, pembiayaan atas program ini menunjukkan kesesuaian atas rencana-rencana program yang disepakati bersama, seperti dalam pelaksanaan realisasi anggaran program. Hubungan yang terjalin baik juga antara pemerintah kabupaten dengan instansi pendidikan yang menyepakati pelaksanaan program beasiswa ini sesuai dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mempercepat peningkatan pendidikan di Kabupaten Blora berjalan cukup baik.

Hal ini berjalan sesuai dengan konsep yang dirumuskan oleh George C. Edward III bahwa komunikasi akan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diinginkan jika beberapa unsur mampu membangun iklim komunikasi yang baik.

2) Sumber Daya

Sumber daya finansial atau anggaran dalam implementasi program Satu Desa Dua Sarjana adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora kepada Instansi Pendidikan Seperti PEM Akamigas dan perguruan tinggi lainnya. Sumber daya finansial atau anggaran yang diberikan sempat mengalami hambatan dikarenakan dampak pandemic covid-19. Namun, peneliti merasa bahwa hal ini tidak mengurangi tujuan pelaksanaan program.

Sumber daya fasilitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora terhadap program Beasiswa Satu Desa Dua Sarjana ini adalah sarana informasi yang tertera di website perguruan tinggi, kemudian grup WhatsApp sebagai wadah komunikasi dan pembagian informasi antar pemerintah dan mahasiswa. Kegiatan seminar atau talkshow sebagai fasilitas tambahan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Blora secara gratis untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa.

Menurut peneliti hal ini sudah sesuai dengan variable yang dirumuskan Edward bahwa salah satu penguat dalam implementasi kebijakan adalah dengan memperkuat aspek sumber daya, baik sumber daya manusia sumber daya fasilitas, dan sumber daya anggaran.

3) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang mencakup 1) tingkat kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor pelaksana, 2) karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, dan 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (Grindle, dalam Subarsono, 2015: 93). Struktur Birokrasi dalam iklim aktor pelaksana program di Dinas Sosial P3A yang masih dinilai belum kondusif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya karakteristik

kepemimpinan yang sedikit berbeda antara pemerintah dengan dengan petugas pelaksana program. Kemudian pada responsivitas kelompok sasaran, yaitu mahasiswa, ditemukan ketidakpatuhan terhadap aturan pengumpulan pemberkasan nilai IP per semester.

Pada variable ini, peneliti merasa bahwa fakta lapangan yang terjadi dalam pelaksanaan program Satu Desa Dua Sarjana dalam aspek struktur birokrasi masih belum berjalan maksimal. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan belum adanya dasar hukum yang mengikat pelaksanaan program Satu Desa Dua Sarjana. Peneliti memperoleh data bahwa program ini masih mengikuti aturan perundang-undangan pusat yaitu peraturan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementor jarang melaksanakan evaluasi program secara terbuka bersama dengan mahasiswa, sehingga muncul ketidaksesuaian dan permasalahan dalam pelaksanaan program. Berdasarkan aspek-aspek yang dipaparkan, dapat tergambarkan mengenai implementasi program diantaranya, terwujudnya upaya pemberdayaan masyarakat yang bermakna dan terstruktur.

4) Disposisi

menurut George C. Edward III meliputi struktur organisasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi. Implementasi program Satu Desa Dua Sarjana terdiri dari pelaksana yang merupakan pegawai-pegawai di instansi pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, karakter yang dimiliki adalah karakter yang bertanggungjawab dalam mengupayakan kinerja program menjadi yang terbaik.

Kemudian, aspek disposisi implementor menurut Edward III (dalam Subarsono, 2015: 90) meliputi watak yang dimiliki implementor, diantaranya berupa komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Implementor program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana telah

memiliki komitmen yang tinggi dalam mengupayakan sumber daya manusia berpendidikan tinggi dalam pembangunan desa. Namun kemampuan pelaksana melalui kegiatan pengawasan implementasi program beasiswa ini sudah optimal.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Program Satu Desa Dua Sarjana merupakan program yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora untuk pemerataan pendidikan khususnya bagi warga miskin agar tetap bisa merasakan mengenyam pendidikan perguruan tinggi negeri. Selain itu program tersebut untuk peningkatan sumber daya manusia untuk berdaya saing yang berkualitas di era digitalisasi. Program Satu Desa Dua Sarjana yang ada di kabupaten Blora saat ini berada di bawah kendali Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Program satu desa dua sarjana dilakukan oleh pemerintah kabupaten Blora bertujuan untuk pemerataan pendidikan di kabupaten Blora yang sampai dengan saat ini masih belum merata.

1) Penelitian ini kemudian dianalisa menggunakan variable George C. Edward III yang menghasilkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Komunikasi, Implementasi program Beasiswa Satu Desa Dua Sarjana dalam keadaan komunikasi telah terjalin baik. Pola koordinasi antar organisasi menunjukkan kesesuaian atas rencana-rencana program yang disepakati bersama, seperti dalam pelaksanaan realisasi anggaran program. Hubungan yang terjalin baik juga antara pemerintah kabupaten dengan instansi pendidikan yang menyepakati pelaksanaan program beasiswa ini sesuai dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mempercepat peningkatan pendidikan di Kabupaten Blora berjalan cukup baik.

2) Sumber Daya, Sumber daya dalam implementasi program ini terbagi menjadi tiga aspek. Sumber daya manusia dalam implementasi Beasiswa Satu Desa Dua Sarjana dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Blora adalah Kepala Dinas Sosial sebagai penanggungjawab, Sekretaris dan Kepala Urusan Tata Usaha sebagai pengelola administrasi, Kepala Urusan Keuangan sebagai pengelola dan realisasi dana program yang mengirimkan uang saku kepada mahasiswa. Sumber daya finansial dalam implementasi program Satu Desa Dua Sarjana adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora kepada Instansi Pendidikan Seperti PEM Akamigas dan perguruan tinggi lainnya. Sumber daya fasilitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora terhadap program Beasiswa Satu Desa Dua Sarjana ini adalah Grup WhatsApp sebagai wadah komunikasi dan pembagian informasi antar pemerintah dan mahasiswa. Kegiatan seminar atau talkshow sebagai fasilitas tambahan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Blora secara gratis untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa. Disposisi Implementor program Beasiswa Satu Desa Dua Sarjana telah memiliki komitmen yang tinggi dalam mengupayakan sumber daya manusia berpendidikan tinggi dalam pembangunan desa. Namun kemampuan pelaksana melalui kegiatan pengawasan implementasi program beasiswa ini sudah optimal. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementor jarang melaksanakan evaluasi program secara terbuka bersama dengan mahasiswa, sehingga muncul ketidaksesuaian dan permasalahan dalam pelaksanaan program. Berdasarkan aspek-aspek yang dipaparkan, dapat menggambarkan mengenai implementasi program diantaranya, terwujudnya upaya pemberdayaan masyarakat yang bermakna dan terstruktur. Struktur Birokrasi, Struktur Birokrasi dalam iklim aktor pelaksana program di Dinas Sosial P3A yang masih dinilai belum kondusif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya karakteristik

kepemimpinan yang sedikit berbeda antara pemerintah dengan dengan petugas pelaksana program. Kemudian pada responsivitas kelompok sasaran, yaitu mahasiswa, ditemukan ketidakpatuhan terhadap aturan pengumpulan pemberkasan nilai IP per semester.

3) Kemudian ada beberapa factor yang mempengaruhi berjalannya program Satu Desa Dua Sarjana yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Pertama, kepedulian Pemerintah Desa yang ada di kabupaten Blora terhadap pendidikan tinggi cukup baik. Pemerintah desa yang merupakan pelaksana program memiliki kepedulian yang berorientasi pada pencapaian tujuan bersama terhadap isu peningkatan minat dalam pendidikan tinggi pemuda desanya.

Kedua, sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial P3A cukup melimpah. Keuntungan yang didapatkan dari pelatihan kualitas pegawai dan lainnya memberikan dampak positif terhadap Dinas Sosial P3A dalam jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Salah satunya adalah program 89 Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana yang ditunjang sejak dibuat pada tahun 2016 ini. Kemudian factor pendukung lainnya adalah bahwa program ini dibuat untuk pemeratakan pendidikan dan mencegah kesenjangan pendidikan yang tinggi di kabupaten Blora. Dengan adanya program satu desa dua sarjana maka dalam beberapa tahun kedepan hasilnya akan bisa dilihat.

b. Faktor Penghambat

Pertama, pengelolaan administrasi program Beasiswa Satu Desa Dua Sarjana yang masih belum teratur. Surat Keputusan ataupun dasar peraturan kebijakan tidak ditemukan bukti fisik dikarenakan kegiatan pengarsipan data-data program tidak berlangsung secara rutin.

Kedua, lingkungan kerja Dinas Sosial P3A yang kurang kondusif. Persuratan mengenai persetujuan dan tidaknya realisasi pengantar anggaran program. Kondisi tersebut menimbulkan tidak konsistennya pengawasan

program dan menimbulkan permasalahan lainnya.

Ketiga, dari faktor penghambat implementasi program ini, dimana mahasiswa penerima program Beasiswa Satu Desa Dua Sarjana tidak menunjukkan sifat suportif terhadap pemenuhan pemberkasan.

Keempat, yang menghambat implementasi program adalah mengenai munculnya Pandemi Covid-19 yang menimbulkan keputusan yang menghambat program Beasiswa Satu Desa Dua Sarjana.

2. Saran

Ada beberapa saran dan masukan yang coba diberikan peneliti terhadap implementasi program Satu Desa Dua Sarjana yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti berharap agar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora dapat semakin meningkatkan sosialisasi penyebaran informasi mengenai program Satu Desa Dua Sarjana di Kabupaten Blora
2. Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan dapat menambah jumlah anggaran yang diberikan terhadap pelaksanaan program Satu Desa Dua Sarjana. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan anggaran yang diberikan kepada penerima beasiswa
3. Kepada pendaftar program Satu Desa Dua Sarjana, peneliti berharap agar pendaftar lebih memperhatikan segala jenis persyaratan yang diberikan oleh pemerintah agar tidak terjadi penolakan atas persyaratan yang telah ditentukan.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang

Pendanaan Pendidikan

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022

Buku Dan Jurnal

Ulyatun Tasyak. Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ponggok Kabupaten

Klaten Policy Implementation Of Satu Rumah Satu Sarjana Scholarship

Program In Community Empowerment In Ponggok Village, Klaten

Regency. Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Spektrum Analisis

Kebijakan Pendidikan, Vol. 11 (4), Edisi Desember 2022: 73-85

Wella Wahyuni. Implementasi Program Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan

Dalam Rangka Pembangunan Pendidikan Di Provinsi Riau. Program

Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

Putri Hafidati. Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa

Pemerintahan Orde Reformasi. Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Pascasarjana Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. V No. 1 Januari Tahun

2020

Muhammad Chabibi. Model Analisis Kebijakan Publik Dalam Program

Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag. Pascasarjana IAIN Kendari. Vol 5 No.1

2019

Website

Berita Program Satu Desa Dua Sarjana Kabupaten Blora Diakses Pada Laman

<https://blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/3092/bupati-ajakmkks-dukung-program-satu-des-dua-sarjana>

Berita Program Satu Desa Dua Sarjana
Kabupaten Blora Diakses Pada Laman

<https://mercusuar.co/2022/10/12/program-satu-desa-dua-sarjana-bupatiarief-ingin-tingkatkan-sdm-dan-ekonomi-masyarakat-blora/>

Berita Program Satu Desa Dua Sarjana
Kabupaten Blora Diakses Pada Laman

https://ngawenkec.blorakab.go.id/post/66/beasi-swa_program_satu_desa_dua_sarjana

Konsep Kebijakan Publik Diakses Pada
https://repository.uinsuska.ac.id/12620/7/7.%20BAB%20II_2018115ADN.pdf

Model Implementasi Kebijakan George
Edward III diakses pada

<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakangeorge-edward-iii/>